



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2019**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DENPASAR
TAHUN 2020**

Kata Pengantar

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar menyusun Laporan Kinerja tahun 2019. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dirancang mengikuti restrukturisasi perencanaan dan penganggaran untuk menyelaraskan dengan Program Pemerintah Kota Denpasar dan RPJMD Tahun 2016-2021.

Berdasarkan restrukturisasi program tersebut, program Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam Renstra yang mencakup tupoksi Badan Pendapatan Daerah yakni Mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan dirancang dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta pertanggungjawabannya dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

Selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 diharapkan dapat menjadi sarana akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Denpasar dalam berkontribusi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Denpasar, 10 Pebruari 2020
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar


I Dewa Nyoman Semadi, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199011 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok “Mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan” mendukung misi Walikota Denpasar Ke 3 yaitu peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*). Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai, yaitu: (1) Meningkatnya sumber – sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah; dan (2) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pajak Daerah. Selanjutnya Tujuan dimaksud dijabarkan kedalam Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu: (1) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah; dan (2) Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah. Hasil analisis pencapaian kinerja Tahun 2019 sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Penetapan Kinerja yaitu :

1. Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terealisasi mencapai 129,30%
2. Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah terealisasi mencapai 112,86%
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah terealisasi mencapai 101,20%

Dari capaian diatas menunjukkan bahwa secara umum Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan misi kota Denpasar. Untuk pencapaian kinerja yang diinginkan, didukung anggaran belanja yang bersumber dari APBD kota Denpasar tahun 2019 sebesar Rp. 46.651.846.930,00 dengan capaian realisasi Belanja Sebesar Rp. 42.371.228.584,00 atau 90,82%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
I PENDAHULUAN	
I.1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi	1
I.2. Aspek Strategis Organisasi	1
I.3. Struktur Organisasi	2
I.4. Sistematika Penyajian	4
II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
II.1. Rencana Strategis 2016 - 2021	5
II.1.1. Visi dan Misi	5
II.1.2. Tujuan	6
II.1.3. Sasaran Strategis	6
II.1.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	7
II.2. Perjanjian Kinerja	7
III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1. Capaian Kinerja Organisasi	9
III.2. Realisasi Anggaran	16
IV PENUTUP	
IV.1. Simpulan	18
IV.2. Saran	18
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Denpasar memiliki Tugas Pokok sebagai berikut:

“Mengkoordinasikan Target Pendapatan Asli Daerah Serta Merealisasikannya Bersama-Sama Dengan Organisasi Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan ”

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yang harus dijalankan sebagai berikut:

1. Penetapan program kerja berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan
3. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
4. Penyelenggaraan pelayanan umum dan urusan Pengelolaan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan daerah.

I.2. Aspek Strategis Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota Denpasar, dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan OPD penghasil untuk menetapkan target Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan utama dalam pembangunan Kota Denpasar sehingga menjadi sangat penting. Dengan demikian dapat dirumuskan Aspek Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Terciptanya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang efisien dan efektif;
2. Terwujudnya Kapasitas Keuangan Daerah yang kuat dalam APBD;

3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar dari sektor pajak daerah.

I.3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

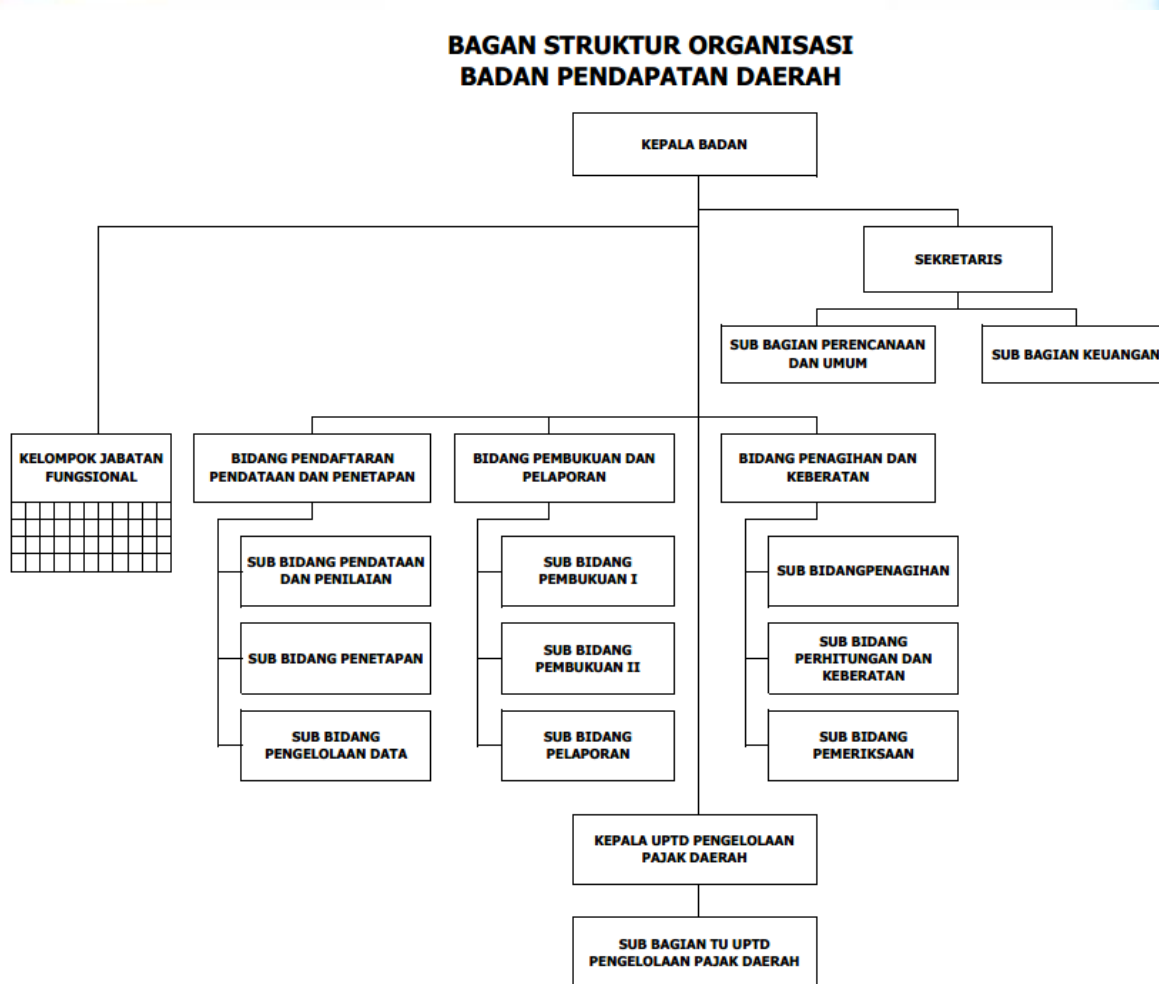
Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah, inspektorat, Badan Daerah dan Rumah sakit umum daerah dan perwali nomor 25 tahun 2018 tentang pembentukan, kedudukan, susunana organisasi, tugas dan fungsi serta tat kerja unit pelaksana teknis daerah pada dinas/badan. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Mempunyai struktur Organisasi sebagai berikut :

Susunan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
 - b. Sub Bidang Penetapan
 - c. Sub Bidang Pengolahan Data
4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - a. Sub Bidang Pembukuan I
 - b. Sub Bidang Pembukuan II
 - c. Sub Bidang Pelaporan
5. Bidang Penagihan dan Keberatan, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penagihan
 - b. Sub Bidang perhitungan dan Keberatan
 - c. Sub Bidang Pemeriksaan
6. UPT BPHTB
 - a. Ka.UPT Pengelolaan Pajak Daerah
 - b. Ka.Sub.Bag Tata Usaha Pengelolaan Pajak Daerah

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagaimana Bagan Struktur , sebagai berikut :

Gambar 1.1



**Tabel 1.1
Kondisi Sumber Daya Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
Tahun 2019**

Kelompok Pegawai	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	90 Orang
Kepala Badan	1 orang
Sekretaris Badan	1 orang
Kepala Bidang	3 orang
Kepala UPT	1 orang
Kepala Sub Bagian	3 orang
Kepala Sub Bidang	9 orang
Staf	72 orang
Tenaga Harian Lepas (THL)	9 orang
Tenaga Kontrak	138 Orang

NB : data Per 31 Desember 2019.

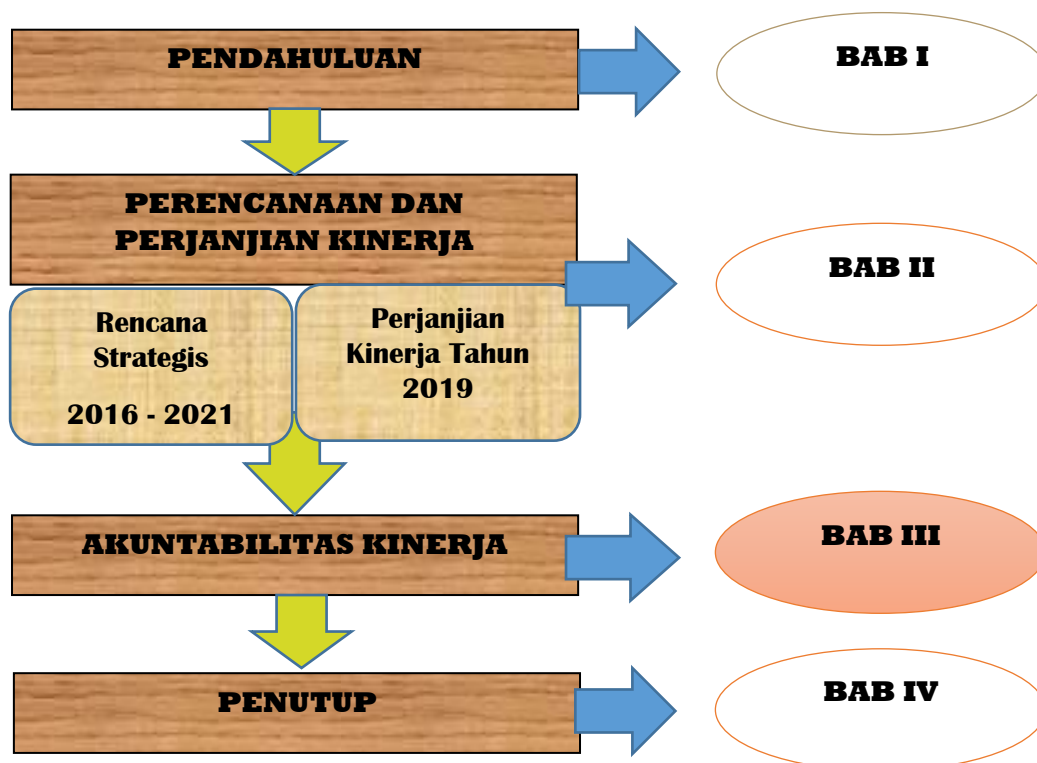
I.4. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar selama Tahun 2019. Capaian Kinerja Tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, merupakan tolok ukur keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik.

Dengan pola pikir seperti tersebut di atas, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.2
Sistematika Penyajian LKJP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang mana terlihat dari penajaman program pada Renstra 2016–2021. Dengan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

II.1. Rencana Strategis

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

II.1.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan visi Pemerintahan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah

**“DENPASAR KREAKTIF BERWAWASAN BUDAYA
DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN “**

Badan Pendapatan Daerah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada misi 3 pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 yaitu “Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*)”

Unuk mewujudkan misi tersebut maka program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

II.1.2. Tujuan

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Pemerintahan Kota Denpasar, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Dalam mewujudkan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar menetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah.

II.1.3. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Dalam Jutaan Rupiah	-	741.00 2.802.9 39,33	766.57 2.844.7 18,69	781.63 9.810.3 00,38	797.58 2.007.9 21,10	835.03 7.984.2 48,28	835.037. 984.248, 28
		Persentase Kontribusi Pad Terhadap Pendapatan Daerah		-	-	-	42%	43%	44%	44%
2	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	-	-	-	81	82	83	84	84

II.1.4. Indikator Kinerja Utama (I K U)

Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*). Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019
Kota Denpasar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
2	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah

II.2. Perjanjian Kinerja

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran program dan kegiatan, di tahun 2019 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran program, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian kinerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tanggal 07 januari 2019 dengan Walikota Denpasar dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang diuraikan dalam tabel 2.3

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	781.639.810.300,38
	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	42%
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	82

Program

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	5.921.835.160
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	RP.	2.144.611.500
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	107.000.000
4. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	1.662.135.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja pemberi amanah. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar melaksanakan kewajiban untuk menyajikan Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 adalah laporan kinerja yang memuat pertanggung jawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 dalam mencapai tujuan dan sasaran dan merupakan penyusunan LKjIP tahun tiga yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Denpasar 2016-2021 dan Rencana Strategis Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran.

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja tahun 2019 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Capaian kinerja dapat dilihat dari Pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap capaian Indikator Kinerja, dimana target kinerja yang sudah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja dibandingkan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai tahun 2019.

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar telah merumuskan sasaran strategis dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan kinerja sasaran strategis pendukungnya. Capaian sasaran strategis diindikasikan dengan capaian Indikator Kinerja yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi dan membandingkan dengan targetnya.

Pengukuran Kinerja Tahun 2019 dengan membandingkan antara Target dengan Realisasi dengan ukuran persentase pencapaian disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rp. 781.639.810.300,38	Rp. 1.010.669.329.532,63	129,30 %
		Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	42%	47,40%	112,86%
2	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	82	82,98	101,20 %

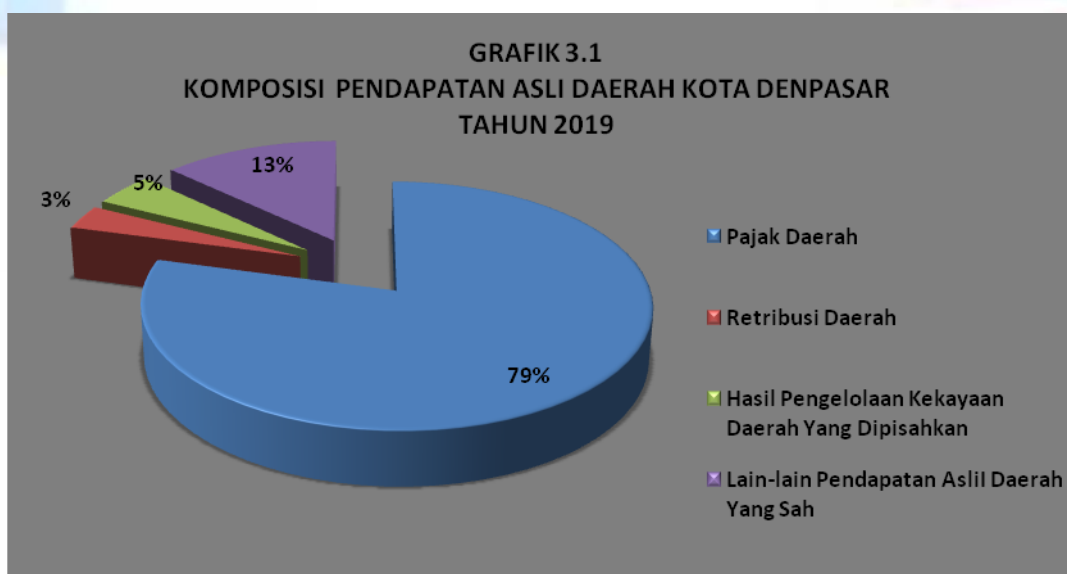
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

INDIKATOR KINERJA
Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 yang ditetapkan sebesar **Rp. 781.639.810.300,38** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 1.010.669.329.532,63** dengan capaian kinerja sasaran yang diperoleh sebesar **128,30%**. yang terdiri :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Pajak Daerah dengan realisasi sebesar | Rp. 800.356.095.356,92 |
| 2. Retribusi Daerah dengan realisasi sebesar | Rp. 33.162.111.523,00 |
| 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan realisasi sebesar | Rp. 45.521.727.968,30 |
| 4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar | Rp. 131.629.394.684,41 |

Komposisi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 dapat digambarkan dalam Grafik 3.1



Apabila Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 mengalami Peningkatan sebesar Rp. 64.260.775.391,52 atau 6,79% dari tahun 2018 sebesar Rp. 946.408.554.141,11 ada pun peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini

Tabel 3.2
Peningkatan Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2018 dan 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	RP. 946.408.554.141,11	RP. 1.010.669.329.532,63	Rp. 64.260.775.391,52	6,79 %

Tabel 3.3
Peningkatan/Penurunan Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019
1	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rp. 807.042.113.054,39	Rp. 1.008.694.194.670,60	Rp. 946.408.554.141,11	RP. 1.010.669.329.532,63

Tabel 3.4
Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019

PAD	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019
Pajak Daerah	574.258.306.168,69	700.341.237.561,12	723.755.110.509,62	800.356.095.356,92
Retribusi Daerah	49.614.843.414,00	40.036.271.266,00	30.904.233.791,00	33.162.111.523,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	35.317.014.956,34	47.788.910.228,39	45.059.003.456,30	45.521.727.968,30
Lain-lain PAD yang Sah	147.851.948.515,63	220.527.775.615,09	146.690.206.384,19	131.629.394.684,41
JUMLAH PENERIMAAN PAD	807.042.113.054,66	1.008.694.194.670,60	946.408.554.141,11	1.010.669.329.532,63

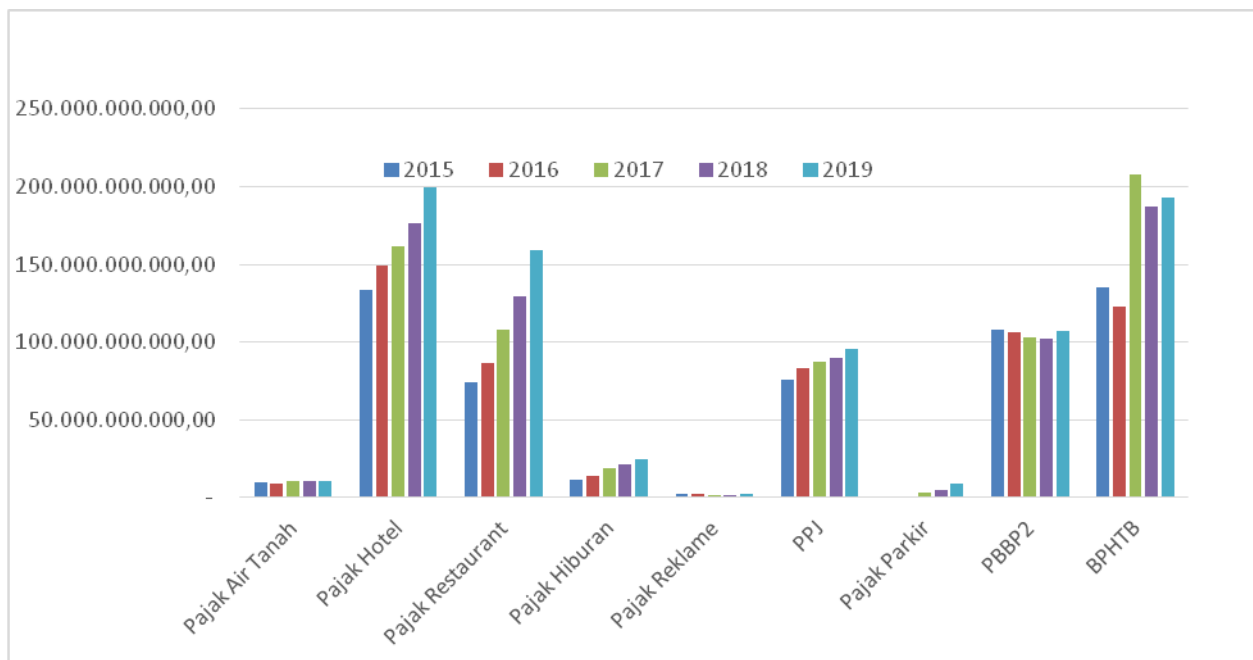
Dilihat dari komposisi Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah menempati posisi tertinggi disusul dengan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang sah dan Retribusi Daerah. Pendapatan dari sektor Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Air Tanah dengan realisasi sebesar Rp. 10.805.827.177,00
2. Pajak Hotel dengan realisasi sebesar Rp. 199.524.196.145,96
3. Pajak Restoran dengan realisasi sebesar Rp. 158.752.914.495,08
4. Pajak Hiburan dengan realisasi sebesar Rp. 24.564.636.356,50
5. Pajak Reklame dengan realisasi sebesar Rp. 1.919.389.218,38
6. Pajak Penerangan Jalan dengan realisasi sebesar Rp. 95.535.189.555,00
7. Pajak Parkir dengan realisasi sebesar Rp. 8.735.436.931,00
8. Pajak Bumi dan Bangunan dengan realisasi sebesar Rp. 107.515.796.338,00
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan realisasi sebesar Rp. 193.002.709.077,00

Tabel 3.5
Realisasi Pajak Daerah
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019

PAJAK DAERAH	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019
Pajak Air Tanah	9.250.786.337,00	10.536.066.764,00	10.598.713.570,00	10.805.827.177,00
Pajak Hotel	149.003.924.988,72	161.589.921.912,78	176.187.949.328,44	199.524.196.145,96
Pajak Restaurant	86.873.174.260,40	107.556.622.846,00	129.737.612.194,87	158.752.914.495,08
Pajak Hiburan	13.960.864.984,00	18.424.593.299,00	21.325.835.167,00	24.564.636.356,50
Pajak Reklame	2.082.920.376,04	1.523.717.710,34	1.712.677.165,31	1.919.389.218,38
PPJ	83.551.087.503,00	87.071.633.950,00	89.992.119.819,00	95.535.189.555,00
Pajak Parkir	-	3.299.083.950,00	4.828.924.867,00	8.735.436.931,00
PBBP2	106.572.022.683,00	102.945.770.345,00	102.119.336.673,00	107.515.796.338,00
BPHTB	122.963.525.036,53	207.393.826.784,00	187.251.941.725,00	193.002.709.077,00
Total Pajak Daerah	574.258.306.168,69	700.341.237.561,12	723.755.110.509,62	800.356.095.356,92

Grafik 3.2
Grafik Pertumbuhan Pajak Daerah 5 Tahun Terakhir



INDIKATOR KINERJA

Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2019 ditetapkan sebesar **42%** dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Data :

- Realisasi Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Taun 2019 Rp. 1.010.669.329.532,63
- Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.132.305.141.255,30

dari data diatas maka dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2019 sebagai berikut :

$$\frac{1.010.669.329.532,63}{2.132.305.141.255,30} \times 100 = \underline{\underline{47,40\%}}$$

Capaian Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Tahu 2019:

$$\frac{\text{Target Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}}{\text{Realisasi Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}} \times 100$$

Perhitungan :

$$\frac{47,40}{42} \times 100 = \underline{\underline{112,86\%}}$$

Dari perhitungan diatas maka dapat disimpulkan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2019 yang ditargetkan sebesar **42%** dapat direalisasikan sebesar **47,40%** atau sebesar **112,86%** dari target yang ditetapkan. Apabila Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2018 yang belum menjadi Indikator kinerja dalam perjanjian kineja akan tetapi jika dilakukan pengukuran, Kontribusi Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2019 sebesar **47,40%** mengalami peningkatan sebesar **1,49%** atau **2,39%** dari Tahun 2018

sebesar **45,91%** adapan peningkatan tersebut dapat dilihat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Peningkatan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2018 dan Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018	TAHUN 2019	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	45,91 %	47,40 %	1,49%	2,39%

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, menggambarkan seberapa besar peran PAD dalam total Penerimaan Pendapatan Daerah. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap Pendapatan Daerah berarti semakin kecil ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan agar mampu membiayai kebutuhan sendiri sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan akhirnya dapat mandiri.

SASARAN STRATEGIS
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Pajak Daerah

INDIKATOR KINERJA
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak
Daerah

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah dengan indikator Indek kepuasan masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah dilaksanakan melalui penyebaran koesioner yang terdiri dari 9 unsur penilaian seperti :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. waktu pelayanan
4. biaya/tarif
5. produk pelayanan
6. kompetensi pelaksana

7. Perilaku Pelaksana
8. penanganan pengaduan, sarana dan masukan
9. sarana dan prasarana

Dari survie yang dilakukan, capaian nilai indek kepuasan masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah diperoleh sebesar **82,98** capaian tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar nilai **82** dengan persentase capaian sebesar **101,20 %**. Apabila Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2018, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2019 sebesar 82,98 mengalami peningkatan sebesar 1,94 atau sebesar 2,39% dari Tahun 2018 sebesar 81,04 adapan peningkatan tersebut dapat dilihat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terhadap Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	81,04	82,98	1,94	2.39 %

III.2. Realisasi Anggaran

Untuk pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan perlu didukung oleh belanja tidak langsung dan belanja langsung. untuk tahun 2019 belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 33.791.400.167,00 atau 92,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 36.366.212.110,00 sedangkan untuk belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 8.579.828.417,00 atau 83,42% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 10.285.634.820,00 sehingga total realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah sebesar Rp. 42.371.228.584,00 atau 90,82% dari terget yang ditetapkan sebesar Rp. 46.651.846.930,00

Belanja langsung yang terdiri dari program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.8
Target dan realisasi Program/kegiatan
Tahun 2019

NO	KEGIATAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.069.138.320	5.468.375.002	90,10%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.203.811.500	1.418.377.230	64,36 %
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	124.000.000	81.977.000	66,11 %
4	Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			
	Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	461.200.000	452.775.000	98,17%
	Kegiatan Pelayanan PBB	402.935.000	378.976.600	94,05 %
	Kegiatan Penyampaian Data dan Informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (promosi/Pameraan)	30.550.000	20.650.000	67,59 %
	Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	994.000.000	758.697.585	76,33%
	Total	10.285.634.820	8.579.828.417	83,42 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2019. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah - langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa- masa mendatang.

IV.1. Simpulan

Dari hasil analisa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar di peroleh kesimpulan:

1. Pencapaian kinerja secara umum, mencapai hasil sebagaimana ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya.
2. Anggaran / Dana sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana diprogramkan, dalam merealisasikan kegiatan dapat dialokasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.

IV.2. Saran

Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, perlu melakukan penajaman prioritas, koordinasi dan meningkatkan kinerja kegiatan sebagai pelaksana program, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan transparan kepada masyarakat dibidang pelayanan pajak daerah serta berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.